



Kontraktor Lama Masih Tinggalkan Utang

Proyek Kampus Poltek Pengambangan

NEGARA - Proyek pembangunan kampus politeknik kelautan dan perikanan Jembrana, yang sempat mangkrak selama lima bulan, akhirnya mulai dikerjakan oleh kontraktor baru yang

ditunjuk langsung oleh kementerian kelautan dan perikanan. Namun, kontraktor lama yang meninggalkan proyek tersebut masih menyisakan utang pada warga sekitar.

Utang yang ditinggalkan kontraktor sebelumnya, PT Sartonia Agung, adalah uang makan para pekerja proyek pada sejumlah warga yang memiliki warung makan di sekitar lokasi proyek

kampus di Banjar Munduk, Desa Pengambangan. Bahkan utang untuk satu warung makan nilainya ada yang mencapai jutaan rupiah. "Utang warung saya saja belum dibayar," kata salah seorang pemilik warung di sekitar proyek.

Karena utang uang makan belum dibayar, sejumlah material bangunan sebelum proyek tersebut dilanjutkan diambil war-

ga. Padahal, pihak kementerian kelautan dan perikanan sudah mendesak pihak PT Sartonia Agung menyelesaikan utang-utang yang belum dibayar.

Menurut Wawan, salah satu warga Desa Pengambangan yang sebelumnya menjadi tenaga keamanan proyek mengakui adanya utang yang belum dibayar PT. Sartonia Agung. Bahkan sebagian gajinya belum dibayar

kontraktor yang sudah di-*black-list* tersebut.

Seperti diketahui, setelah mangkrak selama lima bulan, akhirnya proyek kampus politeknik kelautan dan perikanan Jembrana, kembali dilanjutkan PT. Bianglala Bali. Perusahaan yang melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut dari penunjukan langsung setelah pemenang

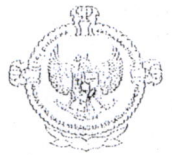
tender pertama PT Sartonia Agung meninggalkan proyek.

Proyek pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang dianggarkan dari APBN tersebut sebelumnya mangkrak. PT Sartonia Agung menjadi pemenang tender dengan harga terkoreksi Rp 44,3 miliar, dari pagu anggaran sebesar Rp 54 miliar. Namun dalam proses

pembangunannya tahun 2017 lalu, waktu pelaksanaan 94 (hari kalender) tidak terpenuhi hingga akhir tahun. Perusahaan meminta lagi perpanjangan sampai 31 Maret 2018 dan pembangunan tetap tidak selesai, sehingga di-*blacklist*. Proyek tersebut sempat diwarnai aksi mogok para pekerja juga menuntut gaji yang tidak dibayar. (bas/han)

Edisi : Senin, 27 Agustus 2018

Hal : 5



PASAR BLAHKIUH



MADE DWIJA PUTRA/RADAR BALI

BERSIH: Beginilah bentuk Pasar Blahkiuh nanti.

Dibangun Pakai Konsep Pasar Tradisional Higenis

MANGUPURA – Paska kebakaran hebat yang meludeskan semua kios di bagian depan Pasar Blahkiuh, Pemkab Badung tak perlu menunggu lama untuk membangun kembali. Pembangunan dengan anggaran Rp 13 miliar lebih itu nantinya untuk pasar berlantai tiga.

Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba menerangkan, proyek pembangunan Pasar Blahkiuh di Jalan Ciung Wanara, Abiansemal, Badung ini mulai dikerjakan dari tanggal kontraknya yakni 2 Juli 2018. "Sudah, sudah mulai dikerjakan. Sebelumnya kan dibongkar dulu bangunan pasar yang lama. Jadi kini sudah mau pengerjaan pilar," ujarnya.

Nilai kontrak pengerjaan pasar tersebut Rp 13.996.296.000. Selain itu, dalam tahap pengerjaannya selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal kontrak yang dimenangkan oleh PT Karya Ananda. Konsep Pasar Blahkiuh ini tetap pasar tradisional higienis yang nanti akan dilengkapi dengan basement dengan bangunan bertingkat t. Sehingga nantinya terdapat parkir yang luas dan dapat dimanfaatkan pengunjung maupun pedagang.

Pada di lantai I nantinya akan ada kios sebanyak 13, Los A sebanyak 63, Los B sebanyak 88 dan Los C sebanyak 135. Selain itu, pada lantai II nantinya akan ada 69 Kios, ruang pengelola, ruang keamanan, ruang menyusui dan 2 toilet. Sedangkan pada lantai III akan digunakan ruang serbaguna. "Untuk perluasan lahan tidak ada. Ini cuma membangun gedung baru dengan membongkar bangunan lama. Yang nantinya kami harapkan bisa menampung semua pedagang yang umumnya berjualan di pasar tersebut," jelasnya. (dwi/dit)

Edisi : Senin, 27 Agustus 2018

Hal : 4



Ketua DPRD Bali Cari Jalan Tengah Penyelesaian Bansos

★ Masalah Bansos Dibahas Lagi Hari Ini



• NUSABALI/SUKANTA

Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP,
Nyoman Adi Wiryatama.

DENPASAR, NusaBali

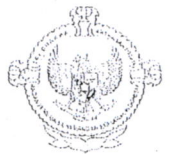
Dua kali pertemuan saat hari libur yang dilakukan DPRD Bali untuk penyelesaian masalah anggaran bansos/hibah yang difasilitasi anggota Dewan, Rabu (22/8) dan Sabtu (25/8), gagal mencapai titik temu. Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menyatakan pihaknya masih mencari jalan tengah untuk penyelesaian masalah bansos/hibah ini.

Adi Wiryatama mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Made Mangku Pastika

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Senin 27 Agustus 2018

Hal : 1 & 15



Ketua DPRD Bali Cari Jalan Tengah Penyelesaian...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

terkait masalah bansos/hibah ini. Selain itu, hal ini juga telah dikomunikasikan dengan Gubernur Bali 2018-2023 terpilih Wayan Koster. Rencananya, masalah besaran dana bansos/hibah tersebut akan dibahas lagi di DPRD Bali, Senin (27/8) ini. "Besok (hari ini, Red) bakal kita carikan solusinya. Kita tawarkan jalan tengah, win-win solution, biar semua pihak enak," ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Minggu (26/8).

Berdasarkan komunikasi dengan Gubernur Pastika soal dana bansos/hibah, kata Adi Wiryatama, disebutkan bahwa semua pogram harus jalan. Antara eksekutif dan legislatif tetap sama-sama berpihak kepada rakyat, terutama masalah penyeimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Bansos/hibah yang rencananya dirasionalisasi untuk pembangunan infrastruktur di Bali Utara, juga merupakan program bagus. Di sisi lain, bansos/hibah untuk pelestarian adat dan budaya Bali juga penting.

"Dari komunikasi saya dengan Pak Gubernur Pastika, ya semuanya memang berpihak kepada rakyat. Intinya sama-sama berjuang untuk masyarakat. Cuma kan harus dicari jalan tengahnya. Program legislatif jalan, program eksekutif juga jalan. Jadi, besok kita ingin semua pihak supaya bisa lebih adem memberikan penyelesaian, tidak lagi ngotot," ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Ta-

banan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.

Menurut Adi Wiryatama, dalam rapat yang digelar unsur pimpinan di Gedung DPRD Bali, Sabtu siang pukul 14.00 Wita sampai malam pukul 19.00 Wita, memang tidak ada kata final terkait bansos/hibah. Masih ada negosiasi soal besaran dana bansos/hibah yang difasilitasi anggota Dewan. "Saya tidak bisa bicara angka, tapi ya dana bansos/hibah yang difasilitasi teman-teman Dewan tetap ada solusinya. Bansos/hibah akan tetap jalan, tapi nominalnya masih kita bahas," ujar ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti ini.

Bocoran yang diperoleh NusaBali, dana bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali yang awalnya sebesar Rp 6 miliar per orang dalam RAPBD Induk 2019, akan diturunkan menjadi Rp 2 miliar per orang. Artinya, dari Rp 6 miliar dipangkas sebesar Rp 4 miliar. Belum termasuk dana bansos/hibah yang difasilitasi Ketua DPRD Bali (1 orang) dan Wakil Ketua DPRD Bali (sebanyak 3 orang) yang besarnya berbeda.

Informasi dari salah satu anggota Dewan, untuk level pimpinan, besaran dana bansos/hibah awalnya dirancang antara Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar per orang. Karenanya, dalam RAPBD Induk 2019, total bansos/hibah dialokasikan sebesar Rp 370 miliar.

Dalam Rapat Pimpinan di Gedung DPRD Bali, Sabtu malam, fraksi-fraksi di luar PDIP

semuanya masih ingin besaran dana bansos/hibah sesuai dengan rancangan awal. "Masyarakat Bali dalam kegiatan adat dan budayanya itu sangat penting dijaga. Kita yang harus mengawalinya," dalih Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, yang ngotot agar bansos/hibah harus disesuaikan dengan rancangan awal.

Fraksi Gabungan Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) DPRD Bali, juga bertahan dengan rancangan awal besaran dana bansos/hibah Rp 6 miliar per orang. Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali beranggotakan 5 orang, yakni Wayan Kari Subali (NasDem), Nyoman Tirtawan (NasDem), I Kadek Nuartana (PKPI), Ni Made Arini (Hanura), dan Ketut Jengskhan (PAN).

Fraksi Golkar DPRD Bali juga idem dito. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Gunawan, masih bertahan dengan rancangan awal soal besaran dana bansos/hibah. Hanya saja, kata Gunawan, sejauh ini belum ada kata sepakat soal dana hibah/bansos. "Belum ada kata final, nanti ada pembahasan lagi," ujar politisi asal Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli ini.

Sekretaris Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, juga ngotot agar besaran dana bansos/hibah jalan sesuai rancangan awal. Kresna Budi mengatakan, Gubernur Bali terpilih Wayan Koster adalah sosok yang jago dalam bidang anggaran. "Saya yakin Pak Koster sebagai mantan

anggota wakil rakyat di pusa sudah tahu bagaimana caranya membawa APBN itu ke Bali untuk pembangunan shortcut (jalan pintas) di Buleleng. Ya, perjuangkanlah dan bawa APBN ke Bali," ujar Kresna Budi kepada NusaBali, Minggu kemarin.

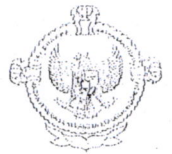
Kresna Budi mengingatkan, dana bansos/hibah untuk masyarakat sudah dirancang di RAPBD Induk 2019 dan difasilitasi oleh anggota DPRD Bali. Dana bansos/hibah ini juga penting. Selama ini, bansos/hibah dinikmati masyarakat Bali secara merata untuk pembangunan pura, pelestarian adat dan budaya. "Jadi, dana bansos/hibah ini kita pertahankan tetap," tegas politisi asal Desa Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali, Kadek Nuartana, mengatakan hampir semua fraksi termasuk PDIP mengatakan mendukung visi misi program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Cok Ace). Tapi, soal dana bansos/hibah, mereka tidak mau tegas berpihak ke mana.

"Saya melihat masih 'ningkang' alias dua kaki dalam pendapatnya. Ini pandangan saya pribadi, semuanya ingin bansos/hibah jalan sesuai rancangan awal. Cuma, mereka juga mengatakan mendukung visi misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih," tandas politisi PKPI asal Desa Pertama, Kecamatan Karangasem ini. **nat**

Edisi : Sambungan

Hal : _____



KABUPATEN KLUNGKUNG

Wabup Kasta Monitoring Kualitas Jalan



FOTO DEWA AYU PITRI/RADAR BALI

PENGAWASAN: Wabup I Made Kasta bersama para pejabat terkait mengecek sejumlah proyek ruas jalan di Kecamatan Nusa Penida, kemarin.

SEMARAPURA - Kecamatan Nusa Penida kian banyak dikunjungi wisatawan untuk berlibur. Untuk itu peningkatan kualitas jalan di pulau yang dijuluki Telur Emas Bali itu terus dilakukan dan tahun ini ditargetkan ada sekitar 30 kilometer ruas jalan yang mengalami peningkatan kualitas dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar. Untuk memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik, Wakil Bupati, I Made Kasta bersama pejabat terkait melakukan monitoring, Jumat (24/8) kemarin.

Tim yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PU-PRKP), Bagian Pembangunan dan Inspektorat Kabupaten Klungkung mengawali kegiatan monitoring tersebut dengan melihat hasil peningkatan ruas jalan Pertigaan Batumadeg-Sebuluh. Peningkatan jalan dengan aspal *cold mix* sepanjang 2,5 kilometer dan menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar lebih itu

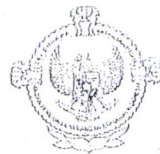
berhasil dituntaskan sesuai kontrak yang berlangsung, yaitu mulai 22 Mei-19 Agustus. Selanjutnya, tim bergerak ke ruas jalan Ambengan-Pelilit sepanjang 2,5 kilometer dengan anggaran Rp 1,8 miliar. Proyek ini juga sesuai kontrak, yakni 24 Mei-21 Agustus. Dari dua lokasi itu, Wabup Kasta menyatakan tidak menemukan adanya persoalan. "Beton pengunci jalan juga sudah sesuai prosedur. Sudah kuat," ungkapnya.

Monitoring juga dilakukan pada ruas jalan Caruban-Sekartaji. Kegiatan peningkatan jalan sepanjang 6,5 kilometer dengan anggaran mencapai Rp 6,4 miliar itu pengerjaannya mulai 18 Mei dan ditargetkan tuntas pada 14 Oktober. Namun hingga bulan Agustus ini, jalan itu baru tuntas sekitar 36 persennya. Menurut Plt Kabid Bina Marga Dinas PU-PRKP Klungkung Ida Bagus Gede Eka Putra, jalan ini merupakan ruas jalan terjauh sehingga butuh

waktu cukup lama untuk membawa material. Meski begitu pihaknya optimistis jalan tersebut bisa dituntaskan sesuai rencana.

"Kami optimistis karena distribusi materialnya sudah terus dicicil. Hanya produksi aspalnya saja yang dilakukan di bawah," ujarnya. Atas kondisi itu, Wabup Kasta meminta agar pelaksana

proyek bisa menyelesaikannya sesuai target. Selain itu pihaknya juga berharap jalan itu diberikan beton pengunci sehingga jalan tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan dengan waktu yang cukup lama. "Kalau tidak ada pengunci betonnya, kami khawatir jalannya bisa cepat rusak," tandasnya. (rba/ayu/yog)



BEDAH RUMAH

Penyaluran Masih Tersendat karena Administrasi

MANGUPURA - Penyaluran bedah rumah untuk rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Badung masih tersendat. Karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Badung terbentur kelengkapan administrasi. Meski demikian Dinas Perkim pun berjanji akan mengejar kelengkapan tersebut sehingga segera bisa tersalurkan bantuan bedah rumah tersebut.

"Saat ini belum bisa karena masih lagi enam desa yang belum melengkapi administrasi, janjinya mereka segera dilengkapi. Kalau itu cepat dilengkapi berarti paling lambat minggu depan sudah tersalurkan uangnya bantuan bedah rumah itu," jelas AA Ngurah Bayu Kumara Putra, Jumat (24/8).

Kata dia, dari total 150 yang dianggarkan pada APBD induk 2018, hanya 132 rumah tangga sasaran (RTS) yang direalisasikan. Namun sisanya lagi 18 RTS sudah ditangani oleh Dinas Sosial melalui kegiatan PKRS. "Nominal Bantuan bedah rumah yang ada di kami mereka mendapat bantuan sebesar Rp 55 Juta per RTS. Total nominal bantuan Rp 7,26 miliar," terangnya.

Kata dia, secara keseluruhan data yang ada pada Dinas Perkim sampai Maret 2018 ada 565 RTS yang memerlukan bantuan bedah rumah dan sudah diusulkan di APBD Perubahan tahun 2018 ini. Untuk sampai dengan 2018, permohonan dari desa juga masih berdatangan. Karena KK baru dan perkembangan kondisi rumah penduduk. Mengingat kalau penduduk yang berpenghasilan rendah pasti mereka prioritas penghasilannya dipakai makan dan kebutuhan utama lainnya.

Sementara untuk pemeliharaan bangunan atau rumah biasanya dinomorduakan sehingga akan selalu ada rumah yang tidak layak huni, kecuali semua penduduk sudah berpenghasilan lebih dari UMR dan bangunan yang sudah umur tidak dipelihara dengan baik pasti akan cepat menjadi kumuh. "Untuk tahun ini juga permohonan bantuan bedah rumah berdatangan. Namun untuk anggaran tahun ini semuanya sudah akan segera terealisasi," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Sabtu, 25 Agustus 18

Hal : 4



Lagi, Aset Milik Pemerintah Berkurang

Terungkap saat Rapat Pansus

AMLAPURA-Pansus aset DPRD Karangasem menemukan aset pemerintah yang berkurang. Temuan pansus seperti luas tanah berkurang dan ada gedung sekolah di regrouping (penggabungan), namun belum dilaporkan atau dihapus sebagai aset.

Wayan Sudira dari Fraksi PDIP mempertanyakan soal gedung SMK atau SMA negeri yang kini kewenangannya di tangan pemprov Bali dan bukan lagi

di Pemkab Karangasem. "Ini harus jelas kalau sudah di provinsi tentunya aset kita di Kabupetan akan berkurang," kata Sudira kemarin (24/8).

Menurut Sudira, ada persoalan selama ini sekolah tersebut dibangun diatas tanah desa adat. Sebelumnya tanah dipinjamkan ke Pemkab Karangasem sebelum akhirnya diambil alih provinsi. Sudira pun mempertanyakan seperti apa statusnya. "Contoh SMKN di Bebandem, lokasi tanah adat dulu dipinjamkan ke Pemkab dan sekarang sekoilah tersebut jadi keweangan provinsi. Nah apakah aset tanah terse-

but juga diserahkan," tanyanya.

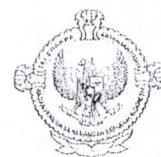
Persoalan lain adalah SD 2 Sibetan yang sudah di regrouping. Sebelumnya SD ini menempati tanah milik desa adat. Desa adat pun berkeinginan mengambil kembali. Namun bangunan disana ternyata belum dihapuskan. "Ini bagaimana prosudur pengembaliannya," ungkapnya.

Sudira menambahkan ada juga aset tanah seluas 10 are yang berkurang. Aset tanah tersebut setelah diukur tidak sampai seluas itu.

Sementara Asisten Pemkab Karangasem I Wayan Purna yang hadir dalam rapat

kerja mengakui kalau banyak masalah soal aset pemerintah. Soal luas lahan berkurang diakui Purna acap terjadi.

"Banyak lahan SD yang dulu belum bersertifikat setelah diukur untuk disertifikatkan ternyata berkurang," akunya. Kekurangan diakui Purna hanya beberapa meter. Kalau kurangnya sedikit pihaknya menerima hasil ukur tersebut. Soal gedung SMK yang menempati tanah desa laporan asetnya diserahkan ke provinsi. Menurutnya sama dengan semua sekolah di Bali termasuk SD adalah kewenangan pemerintah provinsi. (tra/dot)



Parwata Setuju, tapi Minta Setara Bupati

Terkait Istana untuk Ketua DPRD Badung

MANGUPURA - Akhirnya Ketua DPRD Badung I Putu Parwata angkat bicara mengenai rencana pembangunan "istana" untuk ketua DPRD Badung. Bahkan Parwata meminta agar rumah jabatan yang diberikan itu memiliki fasilitas dan konsep yang hampir sama dengan rumah jabatan Bupati Badung.

"Saya terima (rumah jabatan), walau pun konsekuensi tunjangan perumahan saya tidak dapat. Yang paling penting bukan rumah jabatan tapi terpenting bagaimana kita bisa melayani dan menyerap aspirasi masyarakat," jelas Parwata dikonfirmasi, Kamis (23/8).

Dia menegaskan, fasilitas yang setara dimaksud di antaranya berisi ruang pertemuan, ruang rapat, kolam renang, ruang tidur, ruang tamu dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, khusus rumah jabatan Ketua Dewan juga diminta berisi wantilan. "Ya, konsepnya tidak lebih kayak (Rumah Jabatan) Bupati lah. Jadi masyarakat datang kami bisa

menerima mereka," jelasnya.

Selain itu, politikus PDIP ini juga meminta rumah jabatan untuk ketua DPRD Badung itu lokasinya tidak jauh dari rumah jabatan Bupati alias berdampingan. Alasannya, untuk memudahkan koordinasi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Parwata juga mengharapkan, rumah jabatan itu tidak

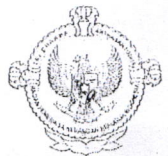
hanya untuk ketua DPRD Badung. Dua wakil ketua DPRD Badung juga agar dibuatkan rumah jabatan juga, dengan fasilitas yang sama pula. Sehingga mereka bisa dengan cepat berkoordinasi baik antar sesama pimpinan dewan dan juga Bupati. "Jadi satu jalur,

setelah ke Ketua Dewan aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan ke bapak bupati, sehingga mempersingkat proses dari birokrasi. Hari apapun bisa masyarakat datang, karena ada protokoler yang menerima. Saya harapkan wakil dewan juga ada rumah jabatan," tegasnya.

Apakah benar siap dengan konsekuensi kehilangan tun-

jangan perumahan sebesar Rp45 juta per bulan? Soal ini, Parwata menyebutkan, pemberian rumah jabatan ini juga telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD. "Itu adalah amanat dan kami wajib mengikuti," ujarnya. Sekadar diketahui, saat ini

sudah dianggarkan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) rumah jabatan untuk ketua DPRD Badung senilai Rp145 juta. Sedangkan bupati dan wakib bupati Badung sudah mendapat rumah jabatan di kompleks Puspem Badung senilai Rp23 miliar lebih yang sudah ditempati sejak awal 2018 lalu. (dwi/yor)



Porprov Telan Rp 30 M

KONI Bali Siapkan Rp 6 M, Pemkab Rp 24 M

TABANAN - Pelaksanaan pekan olahraga provinsi (Porprov) Bali akan digelar pada 2019 mendatang. Berbagai persiapan pun dilakukan KONI Tabanan bersama panitia induk persiapan Porprov. Anggaran yang disiapkan pun tak sedikit, yakni Rp 30 miliar.

Guna mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan Porprov termasuk masalah anggaran, venue dan fasilitas olahraga lainnya. Kamis (23/8) kemarin, Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan KONI Tabanan, Dinas Pendidikan serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Dewan pun menyoroti berbagai persiapan dan persoalan menjelang Porprov di Tabanan.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga dalam rapat mempertanyakan perkembangan persiapan pelaksanaan Porprov tahun 2019. "Kami mohon penjelasan dari KONI, Disdik dan Bapelitbang sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Kami berharap Porprov kali ini Tabanan sukses menyelenggarakan dan sukses prestasi. Tidak ada lagi masalah utama mengenai kesiapan fasilitas olahraga nantinya yang digunakan," kata Dirga.

Dirga mengatakan, pihaknya juga ingin mengetahui anggaran yang diperlukan baik untuk penyelenggaraan Porprov, kesiapan untuk venue maupun kesiapan atlet. Pihaknya juga akan turun untuk mengecek venue-venue yang akan digunakan dalam 38 cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingan. "Kami akan turun bersama anggota dewan lainnya untuk melihat langsung kesiapan di lapangan. Karena anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Porprov sangat



JULIADI/RADAR BALI

RAPAT BAHAS PORPROV: Komisi IV DPRD Tabanan rapat kerja dengan KONI Tabanan, Dinas Pendidikan serta Bapelitbang jelang Porprov 2019 mendatang.

Kami akan turun bersama anggota dewan lainnya untuk melihat langsung kesiapan di lapangan. Karena anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Porprov sangat besar."

I MADE DIRGA

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan

besar," jelas Dirga.

Disisi lain anggota komisi IV I Nyoman Suadiana lebih menyoroti tentang kesiapan atlet Tabanan yang diterjunkan di Porprov termasuk target yang ingin diraih baik pencapaian medali maupun peringkat.

Pihaknya berharap Tabanan mampu meraih prestasi yang lebih baik dari Porprov sebelumnya. "Ini soal gengsi baik selaku penyelenggara maupun selaku peserta. Saya harap Tabanan bisa berpretasi dan harus memiliki target disetiap cabang olahraga," imbuhnya.

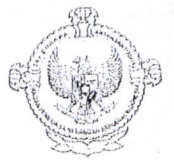
Bahkan KONI Tabanan juga benar-benar memikirkan berapa bonus atlet nantinya ketika mendapat raihan prestasi dalam Porprov. Artinya bagaimana atlet tersebut benar-benar diperhatikan oleh pihak KONI dan pemerintah Tabanan. "Agar tidak habis dibina di Tabanan,

malah pindah ke kabupaten lainnya untuk menjadi atlet dengan alasan bonus lebih tinggi," tandasnya.

Sementara itu Ketua KONI Tabanan I Dewa Gede Ary Wirawan pada kesempatan tersebut menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk penyelenggaraannya.

Terkait venue, jelas Wirawan akan dilangsungkan di seluruh kecamatan kecuali Selemadeg Barat. Selain itu pihaknya juga melakukan pembangunan GOR berstandar nasional tipe B di kompleks stadion Debes. Sementara venue lain akan disebar di seluruh Kecamatan. "Dengan konsep sport, tourism and culture. Kami akan mencoba melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai event olahraga di Porprov," ungkapnya.

Dituturkan Wirawan, pihaknya juga sudah melakukan pendataan venue yang akan dipergunakan. Selain itu juga melakukan bintek untuk Cabor agar siap menyelenggarakan pertandingan. "Anggaran untuk kegiatan Porprov baik untuk penyelenggaraan maupun kesiapan Tabanan selaku peserta dibutuhkan anggaran sekitar Rp 30 Miliar. Dari jumlah tersebut bantuan dari KONI Bali sebesar Rp 6 miliar. Untuk penyelenggaraan Pemkab harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 24 Miliar," tandasnya. (uli/dot)



Kicen Tersangka Lagi

Tersandung Kasus Penipuan CPNS

SEMARAPURA- Mantan anggota DPRD Klungkung yang juga terpidana 1,4 tahun bui dalam kasus korupsi dana bansos fiktif Rp 200 juta, I Wayan Kicen Adnyana kembali harus berurusan dengan hukum. Selasa (21/8) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polres Klungkung. Kicen tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan perekrutan CPNS.

Seperti diketahui, Kicen dilaporkan oleh I Wayan Suda yang merupakan seorang PNS asal Bangli dengan tuduhan melakukan penipuan. Kicen disebut-sebut menjanjikan anak korban CPNS Pemerintah Provinsi Bali tahun 2015. Namun itu semua tidak gratis. Korban diminta memberikan sejumlah uang. Selanjutnya korban mendatangi rumah Kicen untuk menyerahkan uang sebesar Rp 175 juta pada hari Sabtu 28 Februari 2015 silam. Sayangnya, anak korban hingga saat ini belum diterima sebagai PNS Pemprov Bali sesuai yang dijanjikan Kicen. Tidak terima ditipu, korban melaporkan perbuatan Kicen ke Polres Klungkung tanggal 17 Juni 2017.

Dalam kasus tersebut belum menyeret nama lain selain Kicen. Ini lantaran

uang hasil menipu itu hanya dinikmati oleh Kicen. Menariknya, berdasarkan hasil penyelidikan Sat Reskrim Polres Klungkung tidak menemukan ada nyaperekrutan CPNS yang dimaksud.

Sementara itu Kicen yang ditemui disela-sela pelimpahan berkas perkara menyebut dirinya adalah korban. Kicen mengatakan, dia sebelumnya yang melaporkan oknum pegawai Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ke Polda Bali dengan tuduhan yang sama. "Saya dikatakan disini kan penipuan. Saya kan sudah ditipu juga oleh orang di pusat. Orang pusat itu kan baru-baru ini katanya sudah disidik di Polres Klungkung. Saya dalam keadaan sebagai narapidana tidak tahu seperti apa perkembangannya," ujarnya.

Lebih lanjut pria yang belum menyelesaikan masa hukumannya untuk kasus korupsi dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, menegaskan belum ada keinginan mencabut laporannya di Polda Bali. "Saya belum ada keinginan mencabut laporan saya," tandasnya.

Di tempat terpisah, Reskrim Polres Klungkung AKP Made Agus Dwi Wirawan dikonfirmasi mengenai laporan Kicen ke Polda Bali mengungkapkan belum ada pelimpahan kasus penipuan yang dimaksud Kicen. "Kasus CPNS belum ada dilimpahkan dari Polda Bali," tandasnya. (ayu/dot)



DEWA AYU PITRI ARISANTU/RADAR BALI

JADI TERSANGKA: Terpidana yang juga mantan anggota DPRD Klungkung I Wayan Kicen Adnyana kembali berurusan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Selasa (21/8).

TENTANG WAYAN KICEN ADNYANA

- Adalah Mantan anggota DPRD Klungkung
- Saat ini sedang menjalani masa hukuman
- Dia divonis 1,4 tahun penjara plus denda Rp 50 juta
- Terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana bansos fiktif Rp 200 juta
- Dia terlibat korupsi bersama dua anak kandungnya, Ni Kadek Endang Astiti dan I Ketut Krisnia Adiputra

Catatan: Kicen kembali dilaporkan dalam kasus penipuaun CPNS

GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Kamis, 23 Agustus 2010

Hal : 2



Proyek Kampus Poltek Dilanjutkan

Bupati Artha
Berharap Diresmikan
Presiden Jokowi

NEGARA - Setelah mangkrak selama lima bulan, akhirnya proyek kampus politeknik kelautan dan perikanan Jembrana, kembali dilanjutkan. Perusahaan yang melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut dari penunjukan langsung setelah pemenang tender pertama meninggalkan proyek dan pemenang tender kedua menolak melanjutkan pembangunan kampus yang berada di pesisir pantai Desa Pengembangan tersebut.

Kelanjutan pembangunan kampus tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Putu Artha. Menurut bupati dua periode tersebut, saat mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya membahas mengenai Politeknik Jembrana. Pemenang tender pertama yang mengerjakan proyek mundur karena tidak mampu melanjutkan proyek, sehingga perusahaan tersebut dikenakan penalti dan denda.

Setelah lama tidak ada kelanjutan proyek, pembangunan kampus yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggaran APBN tersebut dilanjutkan oleh perusahaan konstruksi yang berkantor di Bali, sehingga diharapkan tidak ada masalah seperti sebelumnya. "Pasti berlanjut," ujarnya.

Pembangunan kampus ditargetkan selesai tahun 2018 ini, sehingga kegiatan belajar mengajar taruna dan taruni yang sudah dua



M. BASIR/RADAR BALI

angkatan ini tidak numpang lagi, tapi menggunakan kampusnya sendiri. Bupati berharap, peresmian politeknik kelautan dan perikanan satu-satunya di Bali ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Peresmian kampus saya berharap kalau tidak menteri, presiden langsung," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa mengatakan, perusahaan konstruksi yang mengerjakan kelanjutan proyek tersebut melalui penunjukan langsung dan sudah menandatangani kontrak kerja. "Baru menandatangani kontrak kerja, belum tau kapan akan dimulai," ujarnya.

Mengenai persentase hasil pengerjaan proyek sebelumnya hanya sekitar 52 persen. Sehingga, sisa pengerjaan proyek yang akan harus diselesaikan hingga akhir tahun 2018 ini sekitar 48 persen oleh perusahaan konstruksi yang melanjutkan pembangunan.

Proyek pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan

Jembrana yang dianggarkan dari APBN tersebut sebelumnya mangkrak. PT Sartonia Agung menjadi pemenang tender dengan harga terkoreksi Rp 44,3 miliar, dari pagu anggaran sebesar Rp 54 miliar. Namun dalam proses pembangunannya tahun 2017 lalu, waktu pelaksanaan 94 (hari kalender) tidak terpenuhi hingga akhir tahun.

Perusahaan meminta lagi perpanjangan sampai 31 Maret 2018 dan pembangunan tetap tidak selesai, sehingga dblacklist. Proyek tersebut sempat diwarnai aksi mogok para pekerja juga menuntut gaji yang tidak dibayar. (bas/han)

**MANGKRAK
5 BULAN:**
Bangunan
kampus Poltek
Kelautan dan
Perikanan
Jembrana di
Pengamben-
gan yang sem-
pat mangkrak.

Edisi : Senin, 20 Agustus 2018

Hal : 5



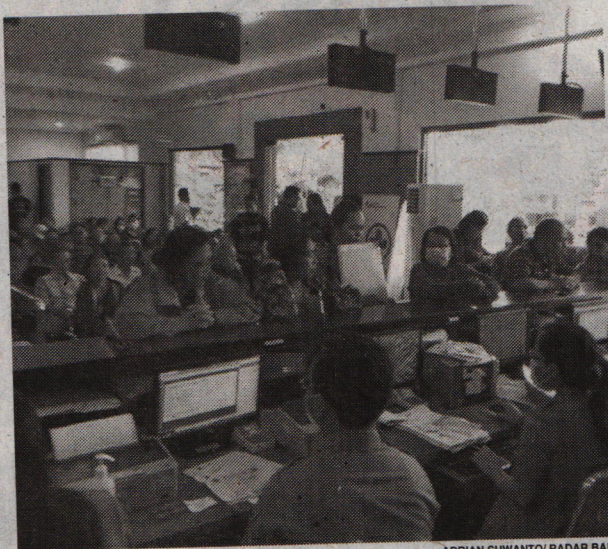
RS Wangaya Tabrak BPJS

Bila Klaim Ditolak Jadi Tanggungan Sendiri

DENPASAR - Pihak RS Wangaya mengaku bingung menjelaskan terkait Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Nomor 2,3 dan 5 Tahun 2018 kepada masyarakat. Pasalnya, peraturan tersebut sangat membatasi tiga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Namun, sampai saat ini pihak RS Wangaya belum menerapkan aturan tersebut, karena masih ada kegaduhan terkait peraturan baru itu.

Dirut RS Wangaya, dr Setiawati Hartawan mengatakan, seharusnya tiga Perdiyan BPJS Kesehatan itu diterapkan pada 21 Juli lalu. Pihaknya mengakui diberitahu melalui telepon oleh pihak BPJS. Hal tersebut sontak membuatnya bingung, lantaran membatasi pelayanan yang sebelumnya ditanggung oleh BPJS.

Seperti untuk operasi katarak yang dibatasi. Untuk RS yang bertipe B ini mendapatkan kuota lima kali operasi dalam sebulan. Dan ditotalkan jumlah operasi dari Agustus sampai Desember hanya 37 kuotanya yang diberikan. Sedangkan jadwal pasien sudah ada dari bulan ini sampai Oktober saja tercatat sudah ada 37 pasien yang akan operasi. Sehingga



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

ANTRE: RS Wangaya tetap melayani seperti biasa termasuk tiga layanan yang dibatasi atau tidak akan ditanggung pihak BPJS Kesehatan.

ga membuat dia bingung untuk menjalaninya dan memberitahu kepada pasien tersebut, "Kami harus ekstra keras menjelaskan kepada pasien. Kami masih bingung. Untuk operasi katarak kami seminggu bisa empat kali. Nah, kuotanya ini hanya lima kali sebulan. Pasien yang lain bagaimana," kata Setiawati.

Tidak hanya itu, untuk pelayanan rehabilitasi medik pun hanya dibatasi dua kali seminggu. Yang menjadi pertanyaan untuk penyakit yang berat seperti pascaoperasi, patah tulang, maupun stroke itu membutuhkan lebih dari dua kali seminggu. Bahkan, untuk kasus berat membutuhkan rehabilitasi medik setiap hari. "Ya kalau sakit

pinggang biasa, bisa dua kali seminggu. Bagaimana untuk yang pascaoperasi dan stroke. Itu bisa perlu setiap hari. Untuk penyakit biasa saja minimal tiga kali dalam seminggu," ujarnya.

Selain itu ibu yang melahirkan, BPJS hanya membiayai satu paket saja. Sedangkan untuk dokter anak tidak ditanggung. Setiawati pun mengungkapkan untuk mengetahui anak yang baru lahir itu sehat atau tidak hanya dokter anak. Kalau dokter anak memberikan tindakan, pelayanannya tidak ditanggung oleh BPJS.

Meski begitu, Setiawati menjelaskan, tiga penyakit yang dibatasi itu masih dilayani di RS Wangaya. Pihak RS Wangaya masih mencoba untuk mengklaim

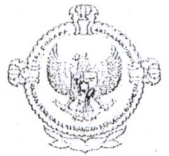
“
Kalau klaim dokter tak dibayar BPJS, maka akan dibebankan ke rumah sakit.”

DR SETIAWATI HARTAWAN
Dirut RS Wangaya

ke BPJS. "Kalau klaim dokter tak dibayar BPJS, maka akan dibebankan ke rumah sakit," ujarnya.

Sehingga sampai saat ini Setiawati mengaku masih menerapkan kebijakan seperti dulu. Tetap menerima pasien BPJS seperti biasa. Diakui untuk urusan pembiayaan pihaknya menyerahkan ke pihak manajemen rumah sakit. Karena menurutnya, melihat situasi sekarang juga masih banyak penolakan dari organisasi kesehatan termasuk Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), IDI, dan IFI. Sehingga dia meminta presiden turun tangan untuk membatalkan peraturan itu.

"Gini, di rumah sakit lain ada yang bereaksi sangat cepat. Kami di Bali kami sepakat pelayanan dijalankan seperti biasa. Sambil mencari solusi dengan BPJS. Apa yang harus dilaksanakan. Misalkan gaduhnya di pusat jangan ikut gaduh di sini. Masyarakat kasihan juga. Semua diperiksa, dibayar atau tidaknya itu urusan manajemen," tuturnya. (feb/yor)



Andalkan Wajib Pajak Baru

Tutupi Defisit Anggaran Pemkab Tabanan

TABANAN - Defisit APBD dalam pertengahan tahun 2018 yang mencapai Rp 41 miliar membuat gusar Pemkab Tabanan. Pasalnya, dari Rp 41 miliar tersebut baru dapat ditutupi Rp 10 miliar dari anggaran BKK Provinsi Bali.

Sekretaris Bakeuda Tabanan, Ni Wayan Maryati mengatakan, sejumlah upaya dilakukan

untuk meningkatkan raihan pendapatan asli daerah untuk menutupi defisit anggaran APBD Tabanan yang mencapai Rp 31 miliar tersebut. Salah satunya menyisir potensi wajib pajak baru (WPB).

Sejauh ini dari data yang ada sebanyak 14 hotel, 9 restoran dan hiburan, 2 tempat hiburan malam akan ditetapkan sebagai wajib pajak baru. "Target kami bulan September, karena dari ketentuan perda, usaha yang mendapatkan penghasilan di atas 5 juta per bulan, wajib ditarik retribusi pajak,"

jelas Maryati, Rabu (8/8).

Tak hanya itu pihak juga melakukan perampungan pajak dengan menggandeng pihak ketiga (Unud), dengan menyasar 15 wajib pajak hotel restoran. Karena usaha tersebut secara kasat mata terlihat ramai, namun saat pembayaran pajak tidak signifikan. Artinya, realisasi yang ada dibandingkan dengan potensi yang mereka miliki, belum sebanding. "Maka kami akan lakukan audit kembali," tegasnya.

Maryati menambahkan upaya lainnya yang akan pihaknya

lakukan pemasangan typing sistem. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan mempercepat dan mempermudah proses layanan pajak. Tidak hanya itu mempermudah pengawasan terhadap wajib pajak. "Sebanyak 20 typing sistem yang akan kami pasang untuk restoran dan hotel," ujarnya.

Lanjutnya, model typing sistem merupakan sistem pajak online yang terintegrasi, mulai dari perekaman data transaksi penjualan, mengolah

data menjadi pelaporan, hingga pembayaran pajak ke bank oleh wajib pajak.

Selain itu untuk meningkatkan pendapatan pihaknya juga mengoptimalkan pemungutan kepada pengusaha yang melaksanakan usaha tidak memenuhi ijin. Baik usaha yang sudah berjalan dan menghasilkan omset di atas 5 juta sebulan, meski usaha tersebut tidak mengantongi ijin tetap. "Kami tetap akan melakukan pungutan pajak sesuai Perbup yang mengatur tentang SOP pemungutan," tandasnya. (uli/dit)